

DAFTAR PUSTAKA

- Amirul, S (2020). *Analisa Tentang Kebijaksanaan Pemerintah.*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja).
- Andi Abdul Malik. (2019). Implementasi kebijakan diskresi pada pelayanan kesehatan badan penyelenggara jaminan kesehatan (bpjs). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 8 (1), 1-8. [https://akper-sandikarse.e-journal.id/JIKSH/article/download;oad/62/42](https://akper-sandikarse.e-journal.id/JIKSH/article/download/oad/62/42).
- Andra Tersiana. 2018. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta.
- Azlan Thamrin.(2019). Politik hukum otonomi daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dibidang kesehatan. *Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4 (1), 33-51.
- Bahagia, D. (2018). Evaluasi Dampak Implementasi Asuransi Kesehatan Nasional terhadap Pengeluaran Pribadi: Bukti dari Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan dan Ekonomi*, 6(2), 89-98.
- BPJS Kesehatan (Badan penyelenggaran jaminan sosial, 2016, peduan layanan bagi peserta BPJS kesehatan (online), (diunduh 4 desember 2016), terdiri dari: <http://sappk.itb.ac.id/wp-content/upload/2014/01/buku-terpadu-layanan-bagi-peserta-BPJS-Kesehatan>.
- Fischer, F, Miller, GJ, & Baihaqi, I (2021). *Evolusi Analisis Kebijakan di Belanda: Handbook Analisis Kebijakan Publik.*, Medan: Nusamedia.
- Implementasi. KBBi, diakses pada 4 October, 2023. <http://kbbi.web.id/implementasi.html>.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Muhammad Irvan Nur Iva. (2015). "Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan

- Sosial (BPJS) Kesehatan Di Kota Makassar". *Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik*, 149-157, 2015.
- Murni Caniya, (2022). Perbedaan Perceived Benefit Dalam Penggunaan Layanan BPJS Di Kota Makassar. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Husanuddin.
- Mustofa, A, Roekminiati, S, Sos, S, KP, M. (2019). *Administrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Nahdiana Nahdiana, Alimuddin Unde, Sudirman nasir, Yunus Amar. (2022). PENTINGKATAN KEPUASAN PESERTA TERHADAP LAYANAN MELALUI. *Jurnal Ilmu Komunikasi* 5 (2), 237-248.
- Nur, AC, & Guntur, M (2019). Analisis Kebijakan Publik. *Makassar: Publisher UNM*.
- oewondo, P., et al. (2019). Progresivitas Pembiayaan Kesehatan di Indonesia: Analisis Data Rumah Tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional. *Jurnal Sistem Kesehatan*, 5(2), 140-149.
- Pemerintah KBBI, diakses pada 4 October, 2023. <http://kbbi.web.id/pemerintah.html>.
- Permatasari, A (2020). Pelaksanaan Pelayanan Publik yang Berkualitas. *DECISION: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 1 Maret 2020.
- Pujilestari, P., et al. (2016). Determinan Partisipasi dalam Program Asuransi Kesehatan Pemerintah Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan dan Perencanaan*, 31(9), 1-9.
- Sabri Hasan, Aditya Halim Perdana Kusuma Putra. (2018). Loyalitas pasien rumah sakit pemerintah ditinjau dari perspektif kualitas layanan, citra, nilai dan keputusan. *Jurnal Manajemen Indonesia* 18(3), 841-96. <https://journals.telkomuniversity.ac.id/ijm/article/download/1731/971>.
- Sahya Anggara. 2018. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
- Simarmata, J., & Munawaroh, M. (2019). Implementasi Program Asuransi Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia: Studi Kasus BPJS

- Kesehatan. Disajikan dalam Konferensi Internasional Kesehatan Masyarakat, Makassar, Indonesia.
- Simarmata, J., & Munawaroh, M. (2019). The Implementation of the National Health Insurance (JKN) in Indonesia: Case Study of BPJS Kesehatan. Presented at the International Conference on Public Health, Makassar, Indonesia.
- Siti Hidayah. (2018). Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Di Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Makassar.
- Soeroso, N. N. (2017). Tantangan dan Strategi dalam Implementasi BPJS Kesehatan. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 5(1), 11-19.
- Sri Siswati. (2015). Kualitas pelayanan Kesehatan dengan kepuasan pasien BPJS di unit rawat inap RSUD Kota Makassar. *Media kesehatan masyarakat Indonesia* 11 (3), 174- 183, 2015.
- Suci Rahmadani, Nasrah Nasrah, Nurhayani, Muhammad Yusri Abadi. Dian Saputa. (2020). Implementasi Sestem Rujukan Pasien BPJS Kesehatan Di Puskesmas Pulau Barrang Lompo Makassar. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo* 6 (2).
- Sudarsono, B., & Saefuddin, A. (2018). The Implementation of the National Health Insurance (JKN) Program in Public Hospitals in Indonesia: A Case Study. *Journal of Health Policy and Management*, 3(2), 89-97.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Supriyanto, S., & Astuti, E. S. (2020). Implementation of the BPJS Health Policy in Hospitals: Case Study in Central Java Province,

- Indonesia. *Journal of Public Health Research and Community Health Development*, 4(1), 1-10.
- Suriansyah Murhaini, 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutmasa, YG (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, Jurnal Cakrawarti, Vol. 4 No. 1.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Tanggung Jawab Pemerintah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Moestopo Beragama Pers.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Yamin, A. E., & Imran, A. (2015). Analisis Implementasi Program Asuransi Kesehatan Nasional dalam Mendukung Pembiayaan Kesehatan yang Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(2), 67-75.
- Yani, D. A., & Efendi, E. (2017). Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada usaha swalayan di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 1(2), 138-149.
- Yunigsih Rahmi. (2013). Permasalahan Dalam Persiapan Pelaksanaan Jaminan kesehatan Nasional 2014. *Infor Singkat Kesejahteraan Sosial*. Vol. V Nomor 17 September 2013: 09-12

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 585024, FAX (0411) 585024
Laman www.fisip.unhas.ac.id

Nomor : 9209/UN4.8.1/ PT.01.04/2023
Lamp. :
Hal : **Permohonan Izin Melakukan Penelitian**

08 Desember 2023

Yth. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
Di
Tempat.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang tersebut berikut ini :

N a m a : Wisnu Wardana Saelan
Nomor Pokok : E051201048
Departemen : Ilmu Pemerintahan.
Alamat : Jl. Rappocini Raya Lorong 5B Nomor 12, Makassar
Nomor Hp. : 0821 9291 2077

Bermaksud untuk melakukan penelitian lapangan/kepastakaan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAYANAN BPJS KESEHATAN DI KOTA MAKASSAR"

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon agar yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan penelitian yang dimaksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan,


Prof. Dr. Hasmati, S.Sos, M.Si. 7
NIP 19680101199033001

Tembusan :
1. Dekan Fisip Unhas;
2. Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas;
3. Kassubbag. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fisip Unhas;
4. Pertiinggal.





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 403/S.01/PTSP/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
1. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Makassar
2. Direktur RSP. Univ. Hasanuddin Makassar
3. Direktur RS Stella Maris Makassar
di-

Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP Univ. Hasanuddin Makassar Nomor : 9209/UN4.8.1/PT.01.04/2023 tanggal 08 Desember 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **WISNU WARDANA SAELAN**
Nomor Pokok : E051201048
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km 10, Makassar
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAYANAN BPJS KESEHATAN DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **15 Januari s/d 15 Februari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 08 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Dekan FISIP Univ. Hasanuddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070/995/SKP/SB/DPMTSP/1/2024

DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 070/995/SKP/SB/DPMTSP/1/2024, Tanggal 08 Januari 2024
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 990/SKP/SB/BKBP/1/2024

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama : WISNU WARDANA SAELAN
NIM / Jurusan : E051201048 / Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / Universitas Hasanuddin
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan km 10, Makassar
Lokasi Penelitian : Terlampir-
Waktu Penelitian : 15 Januari 2024 - 14 Februari 2024
Tujuan : Skripsi
Judul Penelitian : " IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAYANAN BPJS KESEHATAN DI KOTA MAKASSAR "

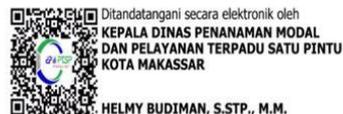
Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 2024-01-10 13:23:27



HELMIY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan Kepada Yth:

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
- Pertinggal,-

Surat Izin Telah Meneliti



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Rochman
Pangkat/Gol : Asisten Manager
Jabatan : Kepala Bagian SDM, Umum dan Komunikasi

Dengan ini menerangkan :

Nama : Wisnu Wardana Saelan
NIM : E051201048
Asal Institusi : Universitas Hasanuddin
Judul : " Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Makassar "

Benar ybs telah melakukan penelitian di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Makassar pada Januari 2024.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 19 Januari 2024
Kabag. SDMUK

Nur Rochman

NR/JOH 02 03

Kantor Cabang Makassar
Jl. Andi Pangarang Pettarani No.78
Telp. (0411) 456057
Email : kc-makassar@bpjs-kesehatan.go.id
Makassar 90013 - Kotak Pos 1315
www.bpjs-kesehatan.go.id



RS. Stella Maris

Jl. Somba Opu No 273
Makassar 90111 - Indonesia

Tel +62 411 854341
+62 411 871391
+62 411 873346

Call center
081 393 888 100
<https://rsstellamaris.com>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 03.DIR.SM.DIKLAT.KET.EX.II.2024

Direktur RS. Stella Maris Makassar menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : Wisnu Wardana Saclan
Tempat / Tgl. Lahir : Makassar, 13 April 2002
NIM : E051201048
Asal Pendidikan : Universitas Hasanuddin
Makassar

Telah melaksanakan penelitian di RS. Stella Maris dalam rangka penyusunan Skripsi yang dimulai pada tanggal 15 Januari 2024 s/d 15 Februari 2024 dengan judul :

“Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Makassar”

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana fungsinya.

Makassar, 26 Februari 2024

Hormat Kami,
Direksi RS. Stella Maris,

dr. Teoroci Luisa Nunuhitu, M.Kes
Direktur

Cc. Arsip

Dokumentasi Wawancara

Kepala Bagian SDM dan Staf Dikantor BPJS Kesehatan Kota

Makassar



Rumah Sakit Unhas

Staf Pelayanan Informasi BPJS Kesehatan dan Peserta BPJS

Kesehatan Rawat inap dan Jalan



Rumah Sakit Stella Maris

Kepala Bagian Informasi Pelayanan BPJS Kesehatan dan staf

Beserta Peserta BPJS Kesehatan atau Masyarakat



